



Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Mengelola Wisata Budaya Pulau Penyengat

Muhammad Patiyusuf¹, Primantoro Nur Vitrianto²

¹Politeknik Pariwisata Batam

Muhammadpati91@gmail.com

Received: 21 Juny 2022; Revised: 14 July 2022; Accepted: 20 August 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2181-2190.2022>

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini yang merupakan objek dan lokasi penelitian ini adalah Pulau Penyengat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian ini, ditemukan beberapa fenomena terkait dengan penelitian yang ditemukan setelah melakukan penelitian ini, yaitu: a). Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang yang mempunyai kewenangan merencanakan dan melaksanakan serta pengawasan terhadap pengelolaan wisata budaya pulau penyengat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat, namun dalam pelaksanaannya masi minim aparatur yang kompetensi di bidang wisata budaya. b) Sosialisasi perlunya upaya yang maksimal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang agar masyarakat pulau penyengat bisa mendapatkan informasi terkait pengelolaan wisata budaya pulau penyengat. Namun dalam pelaksanaannya masi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat. c). Lingkungan menjadi pengaruh dari kondisi lingkungan eksternal di Dalam pengelolaan wisata budaya pulau penyengat menjadi pengaruh yang besar. Hal ini terlihat dari masi banyak masyarakat pulau penyengat yang kurang peduli terhadap kebijakan tersebut

Keywords: Wisata budaya, Sumber Daya Manusia, Pulau Penyengat,

PENDAHULUAN

Wisata budaya merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan dengan tujuan untuk menyaksikan atau menikmati situs purbakala, tempat bersejarah, museum, upacara adat tradisional, upacara keagamaan, pertunjukan kesenian, festival, dan lain sebagainya. Sebagai proses, wisata budaya merupakan aktivitas pertukaran informasi dan simbol-simbol budaya antara wisatawan sebagai tamu dengan masyarakat yang didatangi sebagai tuan rumah. Di Pulau penyengat, kebudayaan sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur alam sehingga dengan demikian aktivitas wisata budaya tidak dapat terlepas pula dengan kegiatan ekowisata. Pengembangan daya tarik wisata budaya ini diharapkan agar wisatawan dapat melihat, mengetahui dan memahami budaya secara lebih mendalam, bukan untuk tujuan berekreasi di lokasi daya tarik yang memiliki



nilai budaya untuk dihargai. Peran interpreter (pemerintah) dalam pengembangan produk wisata budaya sangat penting, menjadi penentu kualitas pengalaman wisatawan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat wisatawan kemungkinan kesulitan untuk memahami berbagai aspek kebudayaan. Sehingga dengan demikian berbagai daya tarik wisata berbasis budaya terutama yang bersifat kebendaan dapat dinikmati tidak hanya sebagai objek fotografi semata, tetapi memiliki nilai tambah berupa pengetahuan apa saja yang saja yang terkandung pada objek tersebut.

Segmen market untuk wisata budaya akan selalu mencari pengalaman dan sesuatu yang tidak hanya otentik, namun juga dapat dibawa dengan interpretasi (pemerintah) yang baik, sehingga ada sesuatu pelajaran yang dapat diperoleh pada saat melakukan perjalanan wisata. Mereka masih akan tertarik kepada peninggalan sejarah permukiman tradisional, dan berbagai upacara atau tarian serta berbagai bentuk kesenian budaya. Selain pemeliharaan otentisitas dan pemeliharaan untuk kelestarian sebagai sumberdaya wisata, diperlukan interpreter(pemerintah), lebih dari sekedar pemandu, yang dapat berkomunikasi dengan baik dan membawakan materi secara bertanggung jawab kepada wisatawan. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang serius ingin mendengar penuturan yang jelas dan sesungguhnya. Bagi mereka peninggalan berbagai benda purbakala tidak cukup dimanfaatkan hanya sebagai objek fotografi, namun perlu dijelaskan tentang elemen-elemen budaya yang lengkap, berkembang atau berubah, serta berbagai isu budaya yang berlangsung.

Pengelolaan wisata budaya perlu dilakukan oleh setiap warga/masyarakat, kelompok dan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam hal melestarikan nilai budaya. Salah satu contoh pulau penyengat yang merupakan memiliki peninggalan budaya dari sebuah bangsa melayu, salah satunya Peran pemerintah daerah dalam hal menjaga budaya dan melestarikan nilai budaya dengan peraturan daerah sebagai wujud komitmen. Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat merupakan perda pertama di Kepulauan Riau sehingga perlu dianalisa sejauh mana harapan berupa program perencanaan dan kenyataan berupa pelaksanaan agar bisa mendapatkan hasil tujuan yang maksimal dalam penerapannya. Merujuk dari hal tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana perda ini dilakukan dengan maksimal atau belum maksimal dalam hal pelaksanaannya. Dimana kota tanjungpinang merupakan ibukota dari provinsi kepri, namun saat ini kota tanjungpinang masi menjadi kota lintasan bagi turis-turis mancanegara bukan sebagai menjadi kota tujuan.

Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat, dalam pelaksanaannya menunjukkan kebijakan tersebut bertujuan untuk menjalankan pengembangan meliputi 1. menjaga, memelihara dan melestarikan adat tradisi, nilai budaya dan kesenian serta sosial keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat 2. meningkatkan daya tarik wisata budaya yang ada di Pulau Penyengat 3. memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui



peningkatan usaha mikro 4. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah 5. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata budaya pulau penyengat 6. mengoptimalkan tugas dan fungsi UPTD dalam pengelolaan kawasan Wisata Budaya Pulau Penyengat



Sumber: Diolah Penulis 2022

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa perda di buat untuk bisa memajukan dan mengembangka suatu daerah. Untuk itu peran disparbud kota tanjungpinang dalam hal menjalankan perda harus sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh pemerintah daerah. Peraturan yang muncul untuk mengatur hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut nampak belum didukung dengan kesiapan aparat pemerintah dalam pelaksanaannya baik dari atas maupun bawah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan kebijakan tersebut. Untuk itulah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang bertugas sebagai pelaksana peraturan, salah satunya adalah mengelola pengembangan Pulau Penyengat yang nyaman untuk dikunjungi wisatawan dan juga ntuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Strategi yang dilakukan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum yang belum maksimal terkait perencanaan dan pelaksanaan. Penjelasan tersebut belum memberikan makna mengenai efektivitas implementasi peraturan daerah yang dikelola oleh dinas pariwisata, tentang sejauh mana yang telah dilakukan dan hambatan yang muncul, maka perlu dilakukan penetapan langkah-langkah yang strategis. Untuk itu peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul Peran Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Tanjungpinang dalam mengelola wisata budaya pulau penyengat”



Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksana terkait tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh Pemda beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip NKRI sesuai yang termaktub dalam UUD tahun 1945. Indonesia memiliki wilayah luas, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala serta penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara terpusat. Pemerintah daerah adalah pelaksana pemerintahan daerah/ kota untuk memimpin serta mengelola implementasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 67 paragraf kedua, memberikan pandangan dan penegasan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban, diantaranya:

1. Memegang erat serta mengikuti nilai-nilai pancasila, mengamalkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga, mempertahankan sekaligus memelihara kedaulatan NKRI.
2. Taat terhadap semua kebijakan dan perundang-undangan.
3. Membangun pola kehidupan yang demokratis.
4. Menegakkan etika serta norma dalam mengimplementasikan segala urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Mengimplementasikan prinsip pelaksanaan kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Menjalankan program strategis nasional.
7. Menjaga sinergi dengan semua instansi di daerah beserta seluruh perangkat daerah.

Sejalan dengan uraian diatas, maka pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dari paling teratas sampai terendah, pemerintahan daerah memiliki beberapa tingkatan (hierarki). Pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur serta wakil gubernur selaku kepala daerah beserta wakil kepala daerah. Kemudian, satu hierarki di bawah provinsi, terdapat pemerintah Kabupaten atau Kota yang dipimpin seorang Bupati atau Walikota. Selanjutnya, terdapat kecamatan, kelurahan atau desa yaitu pelaksana di bawah Pemda yang dipimpin seorang camat, lurah, atau kepala desa. Tugas, peran, serta tanggung jawab pemerintah daerah adalah mensukseskan program pemerintah di tingkat daerah dan mewujudkan seluruh tujuan pemerintahan daerah

Pengembangan Pariwisata

Menurut (Bambang, 2013) keberhasilan pengembangan wisata daerah diawali dari pengembangan destinasi wisata tersebut. Bagian utama dari destinasi wisata yakni:



a. Atraksi dan daya tarik wisata

Atraksi dan daya tarik wisata umumnya dikelompokkan menjadi beberapa tipe tema nya yang diklasifikasikan menjadi 3 tipe daya tarik wisata yakni: wisata alam, budaya, dan minat khusus. Berbagai tipe atraksi serta daya tarik wisata inilah memegang peranan penting pada produk wisata guna menarik wisatawan untuk mendatangi destinasi.

1. Daya tarik wisata alam

Pengembangan daya tarik wisata alam lebih berorientasi pada keindahan serta karakteristik alam daerah, misalnya pasir putih, pantai dengan gelombang ombak, laut dengan terumbu karang melimpah, sungai, hujan, gunung, dan sebagainya.

2. Daya tarik wisata budaya

Pengembangan daya tarik wisata budaya didasarkan pada hasil cipta, karya manusia, seperti situs, *heritage*, ataupun *the living culture*, misalnya seni sastra, seni pertunjukan, ritual, adat istiadat atau kekhasan lainnya di daerah tersebut.

3. Daya tarik wisata minat khusus

Special interest merupakan daya tarik wisata yang dikembangkan berdasar pada kegiatan guna memenuhi keinginan dan harapan wisatawan, misalnya observasi satwa tertentu, memandangi, berbelanja, penyegaran badan, wisata agro, MICE (*meeting, incentive, conference, and exhibition*) dan sebagainya terkait hobi manusia.

Daya tarik wisata menjadi faktor utama dalam menarik wisatawan untuk mendatangi destinasi di suatu daerah, sehingga tiga syarat dibawah ini harus dipenuhi, meliputi:

1. Destinasi harus mengandung “*something to see*” yaitu mempunyai daya tarik tertentu dan khas yang bisa dinikmati wisatawan.
2. Destinasi harus mengandung “*something to do*” yaitu untuk menikmati daya tarik suatu destinasi, harus tersedia fasilitas serta wahana yang bisa dipakai wisatawan untuk menjalankan aktivitas, sehingga mereka merasa nyaman dan betah.
3. Destinasi harus mengandung “*something to buy*” yaitu harus tersedia barang berupa souvenir (cinderamata) dari kerajinan tangan penduduk lokal untuk dapat dibeli serta dibawa pulang oleh wisatawan sebagai buah tangan.

b. Amenitas atau Akomodasi

amenitas adalah bagian utama dan harus dipahami selama mengembangkan destinasi pariwisata. Sebab amenitas adalah berbagai bentuk layanan, fasilitas, serta perlengkapan bagi wisatawan untuk bersantai, beristirahat, dan menginap selama berkunjung ke destinasi tersebut, misalnya *cottage, homestay, penginapan*, dan lainnya.



c. Aksesibilitas dan transportasi

Aksesibilitas dan transportasi merupakan fasilitas bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi sehingga mereka merasa nyaman, misalnya berupa transportasi laut, darat, transportasi penyebrangan, serta transportasi udara, yang seluruhnya merupakan sarana serta fasilitas penopang mobilitas wisatawan dari satu destinasi ke destinasi lainnya.

d. Infrastruktur pendukung

Serangkaian jenis fasilitas umum meliputi prasarana fisik yang berhubungan dengan layanan perhubungan, misalnya jalan, pelabuhan, bandar udara, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya.

e. Fasilitas pendukung wisata lainnya

Jenis fasilitas wisata yang berguna untuk memberi kenyamanan serta kemudahan wisatawan selama ada di destinasi wisata tersebut, misalnya keamanan, toko souvenir, rambu wisata, rumah makan, fasilitas perbelanjaan, biro perjalanan, layanan perbankan, serta berbagai kebijakan khusus yang dibuat untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung wisata.

f. Kelembagaan dan SDM

Kelembagaan dan SDM pariwisata mencakup seluruh unsur organisasi pengelola pariwisata, termasuk sumber daya manusia, yang berkaitan dengan manajemen pengelola wisata, baik unsur masyarakat, pemerintah, dan swasta.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata merupakan seluruh tindakan baik dalam aspek kepariwisataan maupun di luarnya yang bisa berkontribusi dan menjadi elemen-elemen yang mendukung kemajuan sektor pariwisata sehingga destinasi wisata tersebut dapat memberi pengalaman menarik bagi wisatawan serta kesejahteraan publik melalui hadirnya industri pariwisata.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam riset ini memakai metode deskriptif. Menurut (Moh. Nazir, 2011) menjelaskan metode deskriptif merupakan metode untuk mengkaji sekumpulan manusia, kondisi, objek, pemikiran, atau kelas peristiwa saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan faktual tentang fenomena atau fakta yang diteliti. Dalam hal ini peneliti ingin memperoleh informasi yang dalam (*depth*) dan menyeluruh (*comprehensive*) tentang permasalahan yang terjadi dengan memegang kajian teori sebagai acuan utama dalam melaksanakan penulisan dan juga akan melaksanakan analisa terkait kejadian serta fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis akan menemukan factor kunci (*key success*) dan juga isu strategis yang menjadi bahan penulis dalam mengkaji peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam mengelola wisata budaya pulau penyengat.



PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia

Aparatur merupakan hal yang sangat sentral dalam melaksanakan suatu kebijakan oleh karenanya aparatur sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi, memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparatur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam merencanakan kegiatan dan perencanaan dan pelaksanaan wisata budaya. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam menjalankan setiap bentuk kegiatan pelaksanaan kebijakan karena yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang yang mempunyai kewenangan merencanakan dan melaksanakan serta pengawasan terhadap pengelolaan wisata budaya pulau penyengat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat, namun dalam pelaksanaannya masi minim aparatur yang kompetensi di bidang wisata budaya.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan wisata budaya pulau penyengat. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan bisa memberikan gambaran positif kepada masyarakat, agar masyarakat bisa berperan aktif dalam mensukseskan pengelolaan wisata budaya pulau penyengat. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan oleh aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota tanjungpinang sebagai wujud transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur tersebut belum memberikan dampak yang maksimal, dikarenakan tidak semua masyarakat pulau penyengat mengetahui akan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat. Masi banyak Masyarakat pulau penyengat belum banyak yang mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat. Perlunya upaya yang maksimal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang agar masyarakat pulau penyengat bisa mendapatkan informasi secara transparan terkait pengelolaan wisata budaya pulau penyengat.



Lingkungan

Menilai hasil peran Dinas kebudayaan dan Pariwisata adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu perlu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Kondisi disuatu daerah atau tempat mempunyai situasi yang berbeda dalam konteks menjalankan suatu kebijakan, oleh karenanya dalam menjalankan kebijakan ditentukan oleh faktor ekonomi, sosial dan politik lingkungan setempat. Hal tersebut merupakan bagian dari faktor eksternal yang menjadi peranan penting guna tercapainya/keberhasilan dari peran dinas kebudayaan dan pariwisata.

PENUTUP

Berikut adalah kesimpulan yang peneliti dapatkan pada penelitian ini:

1. Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang yang mempunyai kewenangan merencanakan dan melaksanakan serta pengawasan terhadap pengelolaan wisata budaya pulau penyengat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat, namun dalam pelaksanaannya masi minim aparatur yang kompetensi di bidang wisata budaya.
2. Sosialisasi perlunya upaya yang maksimal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang agar masyarakat pulau penyengat bisa mendapatkan informasi terkait pengelolaan wisata budaya pulau penyengat. Namun dalam pelaksanaannya masi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat.
3. Lingkungan menjadi pengaruh dari kondisi lingkungan eksternal di Dalam pengelolaan wisata budaya pulau penyengat menjadi pengaruh yang besar. Hal ini terlihat dari masi banyak masyarakat pulau penyengat yang kurang peduli terhadap kebijakan tersebut

Saran

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang segera memberikan sosialisasi dengan sisetem berkelanjutan agar masyarakat paham dengan tujuan pengelolaan wisata budaya.
2. Melakukan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sehingga terintegrasi dalam mengembangkan wisata budaya pulau penyengat.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang harus segera melaksanakan Pembangunan UPTD dan Fasilitas Umum di Pulau Penyengat dan memaksimalkan



perannya dalam pengelolaan wisata budaya.

BIODATA PENULIS

Muhammad Patiyusuf, lahir di Tanjungpinang 5 Juli 1991, meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang di tahun 2020, dan saat ini sedang menempuh Program Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata pada Politeknik Pariwisata Batam. Saat ini aktif sebagai Anggota Kepolisian Resor Bintan Polda Kepulauan Riau. Untuk itu Penulis dapat dihubungi melalui email:muhammadpati91@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, S. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Amri Marzali. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*.: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan*. Raja Grafindo Persada.
- Bambang, S. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di indonesia*. Gava Media.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Budi, W. (2012). *Kebijakan Publik:Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.
- Damardjati. (2007). *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Pradya Paramita.
- Handoko, T. H. (2010). *Manajemen Personalia & Sumber daya Manusia*. BPF.
- Herlambang, S. (2013). *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami ilmu manajemen)*. Gosyen Publishing.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. R. Editama.
- Mario Barreto Dan Ketut Giantari. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Vol.4:11.2015., Vol.4:11*.
- Moh. Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Mulyadi, D*. Alfabeta.
- Nugroho Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan*.
- Pendit, N. S. (1986). *Ilmu Pariwisata*. Pradnya Paramita.
- Richards, G. (2006). *Cultural Tourism: Global and Local Perspectives*. Routledge.
- Robbins, Stepen P dan Coulter, M. (2010). *Manajemen*. Erlangga.



- S.H.Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Swarbrooke, J. (1999). *sustainable Tourism Management*. CABI Publishing.
- Van Meter, Donal dan Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*.